

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya melimpah, baik berupa sumber daya alam maupun keanekaragaman budaya. Oleh karena itu, pengembangan sektor kepariwisataan di Indonesia menjadi sangat potensial untuk dilakukan. Undang-Undang pasal 4 No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, menjelaskan bahwasanya tujuan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan upaya pelestarian sumber daya baik berupa sumber daya alam maupun kebudayaan, menekan tingkat kemiskinan serta mengatasi pengangguran (Jamalina & Wardani, 2017).

Sebagai sektor padat karya, pariwisata mampu mendorong percepatan pertumbuhan pada berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan berbagai aspek kegiatan masyarakat lainnya (Rohimah et al (2018), Ashley et al (2001), Suansri (2003)). Di Indonesia pengembangan sektor kepariwisataan terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap percepatan pembangunan nasional (Rani, 2014). Serta peningkatan pendapatan negara yang bersumber dari perolehan devisa (Ma'arif et al., 2019). Dapat dilihat dari data terkait target dan capaian nasional yang bersumber dari Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019, menyatakan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap perolehan devisa pada tahun 2015-2018 jumlahnya terus mengalami peningkatan. Penjelasan dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Target dan Capaian Sektor Pariwisata Nasional

Indikator	2015		2016		2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kontribusi pada PDB (%)	4,23	4,25	4,50	4,13	5	4,11	5,25	5,25
Devisa (Triliun)	144	175,71	172	176,23	182	198,89	223	229,50
Jumlah Tenaga Kerja (Juta Jiwa)	11,4	10,36	11,8	12,28	12,0	12,60	12,6	12,7
Wisatawan Asing (Juta Jiwa)	10	10,23	12	11,52	15	14,04	17	15,81
Wisatawan Lokal (Juta Perjalanan)	255	256,42	260	264,33	265	270,82	270	302,4

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019

Upaya pengembangan pariwisata juga dapat memberikan dampak negatif. Karena mampu memicu hilangnya kontrol masyarakat terhadap upaya pelestarian sumberdaya, serta memicu terjadinya peningkatan kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang tinggal didekat daerah tujuan wisata dengan masyarakat yang berada jauh dari daerah tujuan wisata (Jamalina & Wardani, 2017). Selain itu, praktik pengembangan wisata sering menemui berbagai permasalahan, yang secara umum terjadi akibat kurang dioptimalkannya peran masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan (Herdiana, 2019). Dengan demikian, dibutuhkan konsep pengembangan yang mampu memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam keseluruhan kegiatan. Terlebih adanya pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengembangan akan menciptakan aktivitas pariwisata yang sesuai dengan potensi lokal yang ada, sehingga proses pencapaian tujuan pengembangan kepariwisataan akan berjalan lebih maksimal (Marlina, 2019).

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan alternatif pilihan yang efektif digunakan dalam praktik pengembangan kepariwisataan. Karena memberikan peluang besar kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif pada keseluruhan kegiatan pengembangan (Dewi et al., 2013). Segala kegiatan dalam penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat mulai dari pengelolaan sumber daya, produk, dan layanan pariwisata akan dikembangkan dan dikelola secara partisipatif oleh masyarakat lokal (Boonratana, 2010). Konsep pariwisata berbasis masyarakat sering dipahami sebagai konsep pengembangan oleh masyarakat dan untuk masyarakat (Asker et al., 2010). Karena keseluruhan kegiatan pengembangan murni dijalankan oleh masyarakat, yang mana tujuannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Goodwin & Santilli, 2009). Oleh karena itu, kunci keberhasilan dari pariwisata berbasis masyarakat adalah pada adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam keseluruhan kegiatan (Radja et al., 2019). Pada penerapan pariwisata berbasis masyarakat keseluruhan perolehan atau manfaat dalam proses pengembangan pariwisata akan dibagikan secara merata kepada masyarakat lokal (Boonratana (2010), Wiwin (2018)).

Pariwisata berbasis masyarakat juga merupakan salah satu konsep pengembangan yang paling sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Putra (2015), Kayat & Zainuddin (2016)). Karena dalam praktiknya terdapat pertanggungjawaban pada keseluruhan aspek mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya (Boonratana (2010), Nurhidayati & Fandeli (2012), Rohimah et al (2018), Utami et al., (2019)). Dengan demikian maka kelestarian sumber daya akan lebih terjamin. Secara keseluruhan, pariwisata berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai strategi pengembangan masyarakat melalui kemandirian, pemberdayaan, keberlanjutan dan pelestarian dan peningkatan

budaya untuk peningkatan mata pencaharian di dalam masyarakat (Giampiccoli & Kalis, 2012).

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan, termasuk pembangunan pada sektor kepariwisataan. Karena setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengurus dan mengatur segala urusan yang ada di daerahnya. Serta kebebasan untuk mengelola potensi yang dimiliki dan memanfaatkan potensi tersebut untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu daerah di Indonesia yang gencar melakukan pemanfaatan potensi lokal melalui pengembangan kepariwisataan adalah Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi, karena terdapat beragam karakteristik yang menarik (Bahiyah *et al.*, 2018). Bersumber dari Statistik Pariwisata Provinsi Jawa Timur BPS (2020) dijelaskan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, oleh karena itu pengembangan sektor pariwisata di Jawa Timur perlu untuk terus ditingkatkan, Provinsi Jawa Timur juga diuntungkan dengan posisinya yang terletak di antara dua provinsi dengan kekayaan budaya paling tersohor di Indonesia yaitu Yogyakarta dan Bali. Karena ini membuat sebagian wisatawan dari Yogyakarta yang akan menuju Bali atau sebaliknya, melewati Provinsi Jawa Timur dan akhirnya memutuskan berwisata di Jawa Timur.

Besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Jawa Timur

dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan sektor pariwisata terhadap PDRB. Dimana kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 adalah sebesar 17,30%, kemudian pada tahun 2014 adalah 17,14%, pada tahun 2015 adalah 17,46%, dan pada tahun 2016 adalah 17,76% (Aji *et al.*, 2018). Peningkatan pemasukan daerah melalui sektor pariwisata berarti menandakan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah semakin meningkat (Buditiawan & Harmono, 2020).

Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar adalah di Pulau Madura. Madura memiliki potensi wisata yang melimpah, mulai dari wisata alam seperti pantai, wisata kuliner, wisata religi seperti makam pahlawan, dan juga wisata budaya seperti kerapan sapi (Oktaviana *et al.*, 2021). Besarnya potensi wisata yang dimiliki Madura seharusnya dapat dikelola dan dimanfaatkan seoptimal mungkin, guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Madura khususnya Kabupaten Bangkalan.

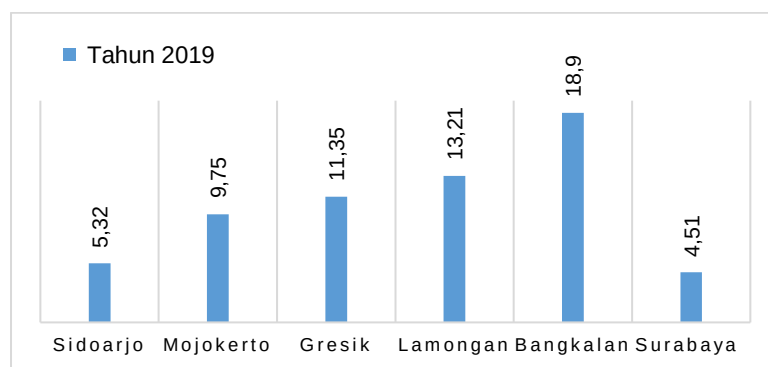
Letak Kabupaten Bangkalan cukup strategis, berada diujung barat pulau Madura dan bersebarangan langsung dengan Kota Surabaya, yang merupakan kota pusat pemerintahan dan bisnis di Jawa Timur, selain itu Kabupaten Bangkalan juga memiliki bentang alam yang indah didukung oleh kearifan lokal masyarakat setempatnya dapat menjadikan Kabupaten Bangkalan daerah yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Terlebih Kabupaten Bangkalan merupakan bagian pusat pengembangan perekonomian Jawa Timur, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengelola wilayah Bangkalan secara terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu (Bangkalan, 2021). Pengembangan kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Bangkalan

didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur pasal 09 yang menyatakan bahwa Bangkalan merupakan kabupaten yang termasuk dalam Gerbang Kertasusila Plus yang memiliki fungsi sebagai pusat infrastruktur pariwisata dan pelayanan kawasan (Sartika, 2020). Gerbangkertokusila sendiri merupakan akronim dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Dimana kawasan ini dimaksudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang berpusat di Surabaya.

Melihat potensi wisata yang cukup potensial serta posisi Kabupaten Bangkalan yang juga cukup strategis, maka wajar jika Kabupaten Bangkalan berusaha menggali berbagai potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, melalui pengembangan sektor pariwisata (Sartika, 2020). Namun dalam praktiknya masih menemui berbagai permasalahan, adapun permasalahan yang dialami oleh Kabupaten Bangkalan pada umumnya adalah pada manfaat dari potensi wisata dan letak yang sangat strategis sebagai pintu gerbang pulau Madura belum bisa sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan (Sartika, 2020). Dengan demikian maka dibutuhkan konsep pengembangan pariwisata yang sesuai agar segala jenis potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bangkalan, dapat dikembangkan secara maksimal dan manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan menjadi sangat penting karena selain agar Kabupaten Bangkalan dapat mewujudkan fungsinya sebagai daerah yang termasuk Gerbangkertokusila untuk dapat menjadi pusat

infrastruktur pariwisata dan pelayanan kawasan. Juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang efektif untuk menekan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. Terlebih presentase penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan jumlahnya terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan presentase penduduk miskin pada daerah lain yang termasuk dalam Gerbangkertosusila (BPS Jawa Timur 2019), dimana pada tahun 2019 presentase penduduk miskin Kabupaten Bangkalan jumlahnya sebesar 18.9%. Adapun rincian presentase penduduk miskin pada daerah yang termasuk dalam Gerbangkertosusila dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: BPS Jawa Timur, 2020 (diolah)

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Daerah Gerbangkertosusila Tahun 2019

Daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan cukup beragam dan menarik. Bersumber dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, terdapat 21 objek wisata di Kabupaten Bangkalan yang tersebar di berbagai Kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang terbagi menjadi 5 jenis daya tarik wisata mulai dari wisata alam, bahari, budaya, religi dan buatan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Data Daya Tarik Wisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020

No	Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata	Kecamatan
1	Api Alam Konang	Wisata Alam	Konang
2	Gunung Geger.		Geger
3	Bukit Kapur Jaddih		Socah
4	Pelalangan		Arosbaya
5	Hutan Mangrove		Sepulu
6	Air Terjun		Galis
7	Air Terjun Bidadari Dhurjan		Kokop
8	Mercusuar	Wisata Bahari	Socah
9	Pantai Maneron		Sepulu
10	Pantai Rongkang		Kwanyar
11	Pantai Siring Kemuning		Tanjung Bumi
12	Pantai Bumi Anyar		Tanjung Bumi
13	Pantai Biru		Tanjung Bumi
14	Kerapan Sapi	Wisata Budaya	
15	Makam Syechona Cholil	Wisata Religi	Bangkalan
16	Makam Sunan Cendana		Kwanyar
17	Pasarean Aer Mata Ebhu		Arosbaya
18	Makam Sultan Abdul Kadirun		Bangkalan
19	Kolla Laggundih		Bangkalan
20	Museum Bangkalan	Wisata Buatan	Bangkalan
21	Taman Rekreasi Kota		Bangkalan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan (diolah)

Salah satu kawasan di daerah yang paling sering dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi daerah wisata adalah kawasan pedesaan, mengingat potensi wisata khususnya pada potensi wisata berbasis potensi alam serta keberagaman budaya umumnya berada di kawasan pedesaan, seiring dengan keberadaan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan (Prayudhi, 2016). Selain itu, upaya pengembangan kawasan pedesaan juga didasari fakta bahwa saat ini desa tidak lagi berdaya dalam menghadapi mekanisme pasar, serta kenyataan bahwa ketimpangan pembangunan antar Desa dan Kota masih sering terjadi sampai dengan saat ini (Rahmasari & Pudjowati, 2017). Dengan demikian upaya pengembangan wisata merupakan salah satu solusi untuk percepatan pembangunan ekonomi di kawasan pedesaan. Serta upaya untuk menekan tingkat kesenjangan yang terjadi antar kawasan pedesaan

dan perkotaan. Undang-Undang yang mengatur tentang upaya pengembangan kawasan pedesaan ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Salah satu Desa di Kabupaten Bangkalan yang gencar mengembangkan potensi wisata yang dimilikinya adalah Desa Labuhan di Kecamatan Sepulu. Dimana di Desa Labuhan terdapat objek wisata yang bernama Taman Wisata Laut. Menurut Mohammad Sahril (ketua pokdarwis payung kuning Labuhan) pengembangan wisata di Desa Labuhan ini bermula dari kerusakan parah yang terjadi pada 17,5 hektare lahan mangrove, serta kerusakan pada terumbu karang yang ada di pantai Labuhan, inilah yang kemudian mendorong pemerintah desa dan masyarakat desa dibantu pihak ke tiga yakni Pertamina Hulu *Energi West Madura Offshore* (PHE WMO) dengan melalui program CSR serta kelompok nelayan Desa Labuhan untuk bekerja sama memperbaiki kerusakan yang ada serta mengubah Desa Labuhan menjadi kawasan wisata (Faikli, 2021). Melalui, pemanfaatan dan perbaikan potensi alam yang ada, mengingat potensi yang dimiliki Desa Labuhan khususnya pada potensi alam sangat besar, seperti hampara pantai yang indah dan pepohonan mangrove. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) sendiri adalah suatu bentuk komitmen perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan juga lingkungan, serta upaya perusahaan untuk melakukan pembangunan ekonomi mandiri yang berkelanjutan (Pranoto & Yusuf, 2014).

Objek pariwisata Taman Wisata Laut merupakan bagian dari konsep *One Belt One Road* (OBOR) Pariwisata di Kabupaten Bangkalan oleh PT. PHE WMO Pertamina yang disodorkan PT. PHE WMO Pertamina sebagai salah satu peta

menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Terdapat empat dimensi utama yang ditekankan dalam program OBOR *Eco Edu Tourism* Bangkalan, yaitu lingkungan, pendidikan, ekonomi, dan sosial (Arfa, 2021). Konsep yang diusung PHE WMO Pertamina tersebut juga sejalan dengan fokus pengembangan objek Taman Wisata Laut bahwa pengembangan Objek Taman Wisata Laut yang meliputi konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak resmi dibuka secara umum pada tahun 2019, pengembangan Taman Wisata Laut berfokus pada konservasi dan transplantsi mangrove dan terumbu karang. Kini sebanyak 877 fragmen karang sudah ditanam dan dikelola oleh Pokdarwis Payung Kuning Desa Labuhan dengan titik transplantasinya di Pulau Ajaib dengan kedalaman lima meter dan Taman Wisata Laut Terumbu Karang (Faikli, 2021). Meski terbilang cukup baru, pengembangan wisata di Desa Labuhan khususnya di Objek Taman Wisata Laut telah mampu memotivasi Desa lain disekitar Desa Labuhan untuk melakukan upaya pengembangan sektor wisata melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada. Daerah di Pesisir Tlangoh, Sungai Bancaran, serta pantai di Desa Bandangdajah menjadi contoh beberapa daerah di sekitar Desa Labuhan yang tertarik untuk ikut serta melakukan upaya pengembangan pariwisata seperti yang dilakukan Desa Labuhan melalui kerja sama dengan PT. PHE WMO Pertamina dengan melibatkan forum komunikasi CSR (Syahrawi, 2021).

Keberhasilan pengembangan wisata di Desa Labuhan lainnya adalah pada tingkat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Objek Taman Wisata Laut. Dimana jika dibandingkan dengan objek wisata alam lainnya yang ada di Kabupaten Bangkalan, tingkat kunjungan wisatawan ke Desa Labuhan khususnya

ke Objek Taman Wisata Laut terbilang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel

1.3.

Tabel 1.3 Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bangkalan pada Wisata Alam Tahun 2020

No	Daya Tarik Wisata Alam	Tahun 2020
1	Api Alam Konang Kec. Konang	469 jiwa
2	Gunung Geger Kec. Geger	2.197 jiwa
3	Bukit Kapur Jaddih Kec. Socah	8.278 jiwa
4	Pelalangan Kec. Arosbaya	4.574 jiwa
5	Hutan Mangrove Kec. Sepulu	16.785 jiwa
6	Air Terjun Kec. Galis	996 jiwa
7	Air Terjun Bidadari Dhurjan Kec. Kokop	677 jiwa

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan (diolah)

Dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, hanya 7 Kecamatan yang telah tercatat secara resmi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan memiliki objek wisata dengan daya tarik wisata alam. Salah satu diantaranya adalah Kecamatan Sepulu, tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata dengan daya tarik wisata alam yang ada di wilayah Kecamatan Sepulu cukup tinggi jika dibandingkan dengan objek wisata di Kecamatan lainnya. Meskipun mayoritas wisatawan yang datang ke objek wisata di Kecamatan Sepulu adalah wisatawan lokal atau masyarakat Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya. Tingginya tingkat kunjungan wisatawan tersebut membuktikan bahwa potensi wisata yang ada di Kecamatan Sepulu memang besar serta mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat merupakan konsep pengembangan yang efektif dalam mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata. Selain itu juga merupakan konsep yang paling sesuai dengan prinsip pengembangan yang berkelanjutan,

yang mana terdapat pertanggungjawaban pada keseluruhan aspek kegiatan mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Ciri yang paling kentara dalam pariwisata berbasis masyarakat adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan pariwisata.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam pengembangan pariwisata di objek Taman Wisata Laut Desa Labuhan, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan bermula dari kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengembangkan potensi alam yang ada menjadi objek pariwisata. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti apakah benar pengembangan yang berangkat dari kesadaran masyarakat tersebut merupakan praktik pengembangan yang menerapkan konsep pariwisata berbasis masyarakat. Karena untuk dapat dinyatakan sebagai pariwisata berbasis masyarakat ada beberapa kriteria yang harus ada dan diterapkan dalam praktik pengembangan pariwisata. Dimana keseluruhan kegiatan pengembangan murni dijalankan oleh masyarakat lokal, yang mana tujuannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Goodwin & Santilli, 2009). Juga harus terdapat partisipasi masyarakat lokal pada keseluruhan kegiatan (Dewi et al., 2013). Serta harus terdapat pertanggungjawaban pada keseluruhan aspek mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya (Boonratana, 2010). Sedangkan kriteria tersebut belum terlihat pada praktik pengembangan di Objek Taman Wisata Laut. Dengan demikian maka perlu dilakukan analisa mendalam terkait penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat pada pengembangan wisata yang ada di Taman Wisata Laut untuk kemudian disimpulkan apakah penerapan pengembangan wisata yang ada di objek Taman Wisata Laut telah sesuai dengan kriteria pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dengan demikian maka

penelitian ini berjudul **“Analisis Penerapan Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat” (Studi Kasus Objek Taman Wisata Laut Desa Labuhan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan terkait latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat pada pengembangan Objek Taman Wisata Laut Desa Labuhan?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat di Objek Taman Wisata Laut Desa Labuhan dengan kriteria ideal pengembangan pariwisata berbasis masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan terkait rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat pada pengembangan Objek Taman Wisata Laut Desa Labuhan?
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat di Objek Taman Wisata Laut Desa Labuhan dengan kriteria ideal pengembangan pariwisata berbasis masyarakat?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk membantu

memberikan sumbangan keilmuan, wawasan serta referensi yang relevan bagi ilmu ekonomi maupun praktisi pengembangan masyarakat. Hasil dari penelitian dapat pula dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian serupa dengan kajian yang lebih bervariasi.

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak swasta, masyarakat ataupun pemerintah dalam memecahkan masalah dengan topik permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Adapun topik permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah terkait pariwisata berbasis masyarakat.